



Jaksa Berperan Maksimalkan PAD

■ Pemprov-Kejati Tandatangani MoU

PONTIANAK, TRIBUN - Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kalbar agar tidak ragu berkonsultasi dengan kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara, dalam menjalankan aturan pemerintahan.

Pesan ini disampaikan Sutarmidji saat penandatanganan MoU antara Kejaksaan Tinggi Kalbar dengan Pemprov Kalbar, di Balai Petiti, Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (4/4).

Midji mengatakan seharusnya pemda memang bekerja sama dengan kejaksaan karena jaksa punya fungsi sebagai pengacara negara untuk menyelesaikan ber-

Saya sarankan kepada seluruh OPD, kalau tafsir dari aturan itu saudara ada kekhawatiran maka silakan berkonsultasi dengan kejaksaan sebagai pengacara negara

Sutarmidji
Gubernur Kalbar

bagai permasalahan perdata dan tata usaha negara.

Dengan MoU itu Midji akan meminta kepada inspektorat untuk berkompilasi bersama kejaksaan. Midji menilai dengan MoU dengan Kejaksaan ini dapat membantu memaksimalkan pen-

dapatan asli daerah (PAD).

"Ada potensi dan kewajiban dari pihak ketiga yang tidak dilaksanakan, bahkan mungkin juga karena dari ketidaksihan dan ketidakpatuhan kita dalam mengimplementasikan aturan," ujarnya.

Dengan MoU ini, Midji juga menilai dapat mencegah tidak pidana korupsi dari berbagai OPD. Oleh sebab itu ia berpesan kepada seluruh kepala OPD untuk tidak ragu berkonsultasi dengan Jaksa Pengacara Negara.

"Saya sarankan kepada seluruh OPD, kalau tafsir dari aturan itu saudara ada kekhawatiran maka silakan berkonsultasi dengan kejaksaan sebagai pengacara negara. Jangan sampai langkah yang saudara lakukan justru melanggar aturan, dan ini yang saya harap bisa

Jaksa Berperan Maksimalkan PAD

dilakukan secara maksimal, dan saya minta serius," jelas Midji.

Pada kesempatan ini, Midji juga berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi yang sudah membantu menertibkan aset pemda di kawasan Gelora Khatulistiwa. "Mudah-mudahan ke depan kawasan tersebut dapat difungsikan maksimal untuk olah raga," tutur Midji.

Midji mengatakan seha-

rusnya pemda memang bekerja sama dengan Kejaksaan yang mana memiliki fungsi jaksa sebagai pengacara negara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan perdata dan tata usaha negara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr Masyhudi menyampaikan, penandatanganan Nota Kesepakatan antara pihak Pemprov Kalbar dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat ini ter-

kait bidang perdata dan tata usaha negara.

Di mana hal tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan sebagian tugas dan wewenang kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang tidak saja berperan melaksanakan kegiatan penuntutan di pengadilan.

Namun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, sebagaimana telah diubah de-

ngan UU Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dapat bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN).

"Yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal kepada negara dan instansi pemerintah pusat maupun daerah seperti pemerintah provinsi serta kepada masyarakat pada umumnya," tuturnya. **(fer)**

Sambungan Hal.9